Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah
(Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)

Muhtadi

Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung
Gedung B FH Unila Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung
email : rajahiu@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan kampung dengan perda antara lain mencakup sejarah penamaan, asal-usul kampung, dan wewenang pemerintahan daerah dalam mengatur kampung dengan peraturan daerah. Adapun landasan yuridis pengaturan kampung dengan peraturan daerah adalah sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : *Kampung, Desa, dan Peraturan daerah.*

I. Latar Belakang

Sejak Hindia Belanda otonomi desa merupakan salah satu bentuk pengakuan yang diberikan oleh Kerajaan Belanda terhadap struktur dan pelaksanaan pemerintahan asli yang telah tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara sebelum kedatangan Belanda. Pasca kemerdekaan, meskipun sempat terjadi penyeragaman penamaan dan pemahaman terhadap pemerintahan masyarakat terendah tersebut, namun peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi pemerintahan desa atau nama lainnya mempunyai semangat yang sama, yaitu :

(1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem

nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa;
- (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan

pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

- (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
- (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.¹

Desa atau sebutan lain dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah² sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,³ adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Pemda mengakui otonomi yang dimiliki desa dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Kewenangan desa berdasarkan Pasal 206 UU Pemda adalah mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

Pembentukan desa merupakan upaya konstitusional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali pelayanan, serta sebagai upaya peningkatan demokratisasi masyarakat desa.

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, yang berdasarkan wewenang yang diatur dalam undang-undang

¹ Penjelasan Umum angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lihat juga Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

² Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4437.

³ LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844.

pembentukan tersebut, serta berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, dan juga kewenangan yang diatur dengan undang-undang Pemda, beserta PP Nomor 38 Tahun 2007, menggunakan nomenklatur kampung sebagai padanan dari istilah desa sebagaimana diintrodusir dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Kampung Serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan.

Sebagai daerah otonom baru, kampung dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan hasil bentukan dari pemerintah daerah induk, yaitu Kabupaten Tulang Bawang. Untuk mempercepat proses pembangunan, pemberian pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya mengikuti sertakan masyarakat dalam proses demokratisasi, maka terhadap kampung-kampung induk yang telah memenuhi persyaratan dalam pemekaran yang meliputi : a). jumlah penduduk; b). luas wilayah; c). bagian wilayah kerja; d). perangkat; dan e). sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dapat dilakukan pembentukan kampung baru yang dibentuk dengan peraturan daerah. Salah satu kampung induk yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pemekaran adalah Kampung Indraloka Dua sehingga menjadi tiga kampung, yaitu Kampung Indraloka Jaya dan Indraloka Mukti, serta kampung induk, Indraloka Dua Kecamatan Way Kenanga.

Namun demikian, dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan baik secara vertical ataupun horizontal, serta

menjamin bahwa peraturan daerah tentang pembentukan kampung di Kecamatan Kenanga tersebut tidak menghambat investasi, pembangunan dan kepentingan umum, maka kegiatan pengkajian secara akademis melalui Naskah Akademik yang menghadirkan argumentasi filosofis, yuridis dan sosiologis menjadi penting. Dengan demikian, apa yang menjadi landasan teoretis dan landasan yuridis dalam pembentukan kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat?

II. Pembahasan

2.1. Landasan Teoretis

Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 setelah perubahan menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dari pengaturan tersebut, desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah.⁴

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah⁵ hanya menyebutkan bahwa pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-undang. Untuk kemudian diimplementasikan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.⁶

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan desa sebagai :

⁴ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara, Malang, 2012, hlm. 36.

⁵ LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN No. 3037.

⁶ LN1979 No. 56, TLN No. 3153

“....suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, sebelum adanya UU Desa 1979 tersebut, Inpres Nomor 5 Tahun 1976 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial-administratif langsung di bawah kecamatan.

Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah⁷ mengartikan desa sebagai

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pasal 1 angka 12 UU Pemda 2004 menyebutkan bahwa Desa atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian berkarakter pluralisme yang menyebutkan istilah lain sebagaimana pengertian dalam peraturan perundang-undangan tersebut, menurut Bagir Manan adalah,

pertama bahwa pemerintahan desa tidak harus menggunakan nama desa. Diperbolehkan menggunakan nama menurut adat istiadat seperti *dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij* dan lain sebagainya, dan *kedua*, pengakuan terhadap otonomi asli.⁸

Secara mutatis mutandis sebagian pijakan dasar teoretis dalam bagian ini merupakan pengambilalihan dari landasan teoretis yang terdapat dalam Naskah Akademik RUU Desa Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri Tahun 2007 yang mencakup substansi teori tentang penggabungan, penghapusan dan pembentukan Desa; isu kedudukan dan kewenangan Desa; isu penyelenggaraan pemerintahan Desa; isu perencanaan pembangunan Desa; keuangan Desa; isu lembaga kemasyarakatan; dan isu kerjasama antar Desa.

Namun demikian, bagian yang dianggap mempunyai relevansi langsung dengan rencana pembentukan Perda tentang Pembentukan Kampung Indraloka Jaya dan Indraloka Mukti adalah bagian dari teori pertama yang terkait dengan Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa. Demikian pula realitas normatifnya, RUU Desa hadir sebelum terbentuknya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Fakta penting terkait dengan penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa adalah *Pertama*,

⁸ Ateng Syafrudin, dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 12.

⁷ LNRI Tahun 1999 No. , TLNRI No.3839.

luasan geografis dan demografis Desa menjadi isu penting dalam otonomi Desa, terutama sebagai basis kekuatan sumber daya lokal. Berdasarkan kalkulasi nominal, Desa umumnya mempunyai keterbatasan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi Desa, dan lain-lain. Provinsi NAD mempunyai jumlah penduduk sebesar 3.899.290 jiwa, yang mendiami wilayah seluas 56.500,51 Km² dan Desa sejumlah 5.853 dan kelurahan 112. Tetapi Sumatera Utara, dengan penduduk sebesar 12.333.974 dan wilayah seluas 72.427,81 (lebih besar dari NAD), mempunyai Desa/kelurahan lebih sedikit dari NAD, yakni 4.924 dan 547 kelurahan. Sumatera Barat yang mempunyai penduduk lebih besar dari NAD (yakni sebesar 4.549.383 jiwa pada tahun 2007), tetapi hanya mempunyai Desa (Nagari) sebanyak 634 ditambah 256 kelurahan. Jumlah Desa yang relatif kecil juga terjadi di Bangka Belitung (266 Desa), Kepulauan Riau (144 Desa), Daerah Istimewa Yogyakarta (391 Desa), Bali (602 Desa), NTB (711 Desa), Sulawesi Tenggara (364), dan Gorontalo (312 Desa). Jawa Tengah (seluas 32.799,71 Km² dan berpenduduk 32.952.040 jiwa) dan Jawa Timur (seluas 46.689,64 dan berpenduduk 37.076.283 jiwa) memegang rekor kepemilikan Desa, yakni masing-masing 7.817 Desa dan 744 kelurahan serta 7.682 Desa dan 785 kelurahan. Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk lebih kecil daripada Jawa Timur dan Jawa Timur, tetapi mempunyai jumlah Desa terbanyak di Indonesia. Kalau dihitung secara rata-rata setiap Desa/kelurahan di Jawa Tengah mempunyai wilayah seluas 3,83 Km² dan berpenduduk rata-rata 3.849 jiwa. Sementara tetangganya, DIY, mempunyai komposisi yang lebih menarik daripada Jawa Tengah, yakni rata-rata Desa/kelurahan mempunyai

wilayah seluas 7,15 Km² dan dihuni penduduk oleh sekitar 7.488 jiwa.

Sejauh ini belum terdapat ukuran yang ideal untuk luasan wilayah sebuah Desa, sebagai kekuatan penopang bagi otonomi Desa, karena potret yang kontras antara NAD dan Sumatera Barat di satu sisi serta Jawa Tengah dan DIY di sisi lain bisa menjadi bahan kajian berikutnya. Tetapi beberapa orang, termasuk pada sosiolog seperti Selo Soemardjan (1992) maupun Nasikun (2004) masih meragukan apakah mungkin kecilnya ukuran Desa menjadi basis yang kuat bagi otonomi Desa. Karena itu keduanya mengusulkan perlunya penggabungan Desa-Desa yang kecil seperti pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa Sultan HB IX. Kondisi geografis, demografis maupun spasial Desa itu tentu merupakan masalah yang harus diperhatikan dalam mendisain otonomi Desa.

Sedangkan setelah lahirnya PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diikuti dengan pengesahan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka standarisasi jumlah penduduk dan luasnya setiap desa adalah sebagai berikut :

1. wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
2. wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga; dan
3. wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga.

Selain ukuran di atas, ada juga masalah lain yang muncul paralel dengan ukuran Desa, yakni masalah pemekaran dan penggabungan Desa. Desa-desa di Jawa Tengah umumnya tidak mau digabung. Di Luar Jawa terjadi kecenderungan pemekaran Desa, apalagi di daerah transmigrasi

yang selalu menambah jumlah Desa. Jumlah Desa di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak (pemekaran Desa). Pada tahun 1969/70, tercatat sejumlah 44.478 Desa kemudian bertambah menjadi 45.587 Desa pada tahun 1973/74, bertambah lagi sekitar 15 ribu Desa/kelurahan menjadi 60.645 pada tahun 1978/79. Pada tahun 1983/84, ketika terjadi penataan Desa baru berdasarkan UU No. 5/1979, jumlah Desa/kelurahan bertambah menjadi 66.437. Sekarang, 2007, jumlah Desa/kelurahan mencapai 69.926, meskipun Sumatera Barat sejak 2000/2001 melakukan pengurangan Desa sekitar 5000-an.

Hal ini menunjukkan bahwa laju pemekaran Desa jauh meninggalkan laju penghapusan atau penggabungan Desa. Beberapa studi menunjukkan bahwa bertambah jumlah Desa ini lebih didasarkan pada motif: perebutan sumber daya; politik pembentukan dan pemekaran kecamatan dan kabupaten baru; politik etnik identitas; primordialisme; memperbesar akses sumberdaya dari pemerintah dan sebagainya. Di Sumatera Barat, misalnya, terjadi pembengkakan jumlah Desa dari 500-an menjadi 5000-an pada tahun 1980-an karena dimaksudkan sebagai siasat lokal untuk memperbanyak perolehan Bantuan Desa. Tetapi yang menarik, setelah kembali ke Nagari, Sumatera Barat melakukan penggabungan Desa kembali sesuai dengan satuan teritorial semula, yakni dari 5000-an menjadi sekitar 600-an Nagari.

Kedua, penggabungan, penghapusan dan pembentukan Desa sangat terkait dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kerangka regulasi. Pada zaman Belanda pengaturan mengenai Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa (P3D) secara yuridis termuat dalam Bijblad no. 9308 yang ditetapkan dengan *gouvernementsbesluit* tanggal 28 Oktober 1919 Nomor 13 tentang

penggabungan dan pemecahan Desa. Tujuan dari pemerintah Belanda untuk mengadakan penggabungan Desa adalah untuk memperkuat dasar kemasyarakatan Indonesia.

Menurut Soetardjo, yang berhak untuk mengambil inisiatif dalam penggabungan atau pemecahan Desa adalah: (1) Pamong Praja; (2) Pemerintah daerah Kabupaten; atau (3) Rakyat Desa bersangkutan.

Syarat-syarat penggabungan atau pemecahan Desa di dasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk dan kekuatan untuk membiayai dirinya sendiri. Namun berdasarkan hasil pengkajian dikemukakan bahwa penggabungan atau pemecahan Desa tidak disenangi oleh masyarakat. Penggabungan atau pemecahan Desa dapat menyebabkan lemahnya ikatan masyarakat yang ada di dalam Desa (Desa-verband), bahkan dapat mengakibatkan lemahnya hubungan antara masyarakat dan kepala Desanya.

Pasca kemerdekaan, pengaturan tentang penggabungan, penghapusan dan pembentukan Desa diatur dalam UU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UU no. 32 Tahun 2004, P3D diatur dalam pasal 200 ayat 2 yang menyebutkan : “Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakaras masyarakat”. Persyaratan itu tentu saja sangat longgar karena Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa hanya didasarkan pada prakarsa masyarakat. Akibatnya jumlah pemekaran Desa menjadi semakin besar, tanpa memperhatikan aspek-aspek kapasitas pemerintahan, maupun kemampuan keuangan.

Ketiga, sejalan dengan proses modernisasi, maka beberapa Desa kemudian berubah menjadi kelurahan. Secara regulatif hal ini dimungkinkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 yang dalam pasal 200 ayat 3

menyebutkan “ Desa di kabupaten/ kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai dengan usul dan prakaras pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Perda”. Namun, dalam perubahan status Desa menjadi kelurahan timbul permasalahan yang menyangkut peralihan pemilikan aset dan perubahan perangkat Desa. Peralihan itu tentu saja berpengaruh terhadap system penganggaran daerah.

Keempat, Pemekaran Desa tidak diikuti dengan penetapan dan penegasan batas Desa di dalam peta Desa dan penyelesaian kejelasan pembagian aset Desa. Akibatnya pasca pemekaran muncul konflik antara Desa induk dengan Desa pemekaran atau bahkan antara Desa pemekaran dengan Desa tetangga.

Logemann sebagaimana dikutip A. Hamdi S. Attamimi menyebutkan bahwa

“...pengalihan sistem pemerintahan “Republik Desa” ke dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang modern itu dengan memindahtanamkan (overplanting) dari desa yang memenuhi kebutuhannya sendiri (autarke dorp) kepada negara modern (moderne staat), meski disangsikan keberhasilannya.⁹

Desa secara historis merupakan cikal bakal dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian pentingnya kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sampai kemudian menjadi salah satu dalam pembahasan di BPUPKI dan

PPKI yang kemudian melahirkan UUD Tahun 1945 dengan menempatkan desa sebagai salah satu substansi yang diakui negara.

Eksistensi desa telah ada sejak lama misalnya ditemukan dalam berbagai literatur yang menyebutkan keberadaannya sebagai pemerintahan terendah di Indonesia dahulu kala bukan berasal dari budaya barat, yang berada langsung di bawah kerajaan, serta berbentuk desa yang mempunyai hak khusus tertentu seperti desa kramat, perdikan atau istilah lain memberikan karakteristik tersendiri setiap desa tersebut. Mohammad Yamin antara lain menyebutkan bahwa desa yang mempunyai otonomi sebagaimana yang dikenal saat ini juga ditemukan dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit, sebutannya adalah swagrama (grama).

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagaimana dikutip Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a adalah suatu daerah hukum dapat dikategorikan sebagai desa apabila memenuhi syarat-syarat :

- a. Mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan dengan batas-batas yang sah;
- b. Berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangga sendiri;
- c. Berhak memilih atau mengangkat kepada daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri;
- d. Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri;
- e. Berhak atas tanah sendiri;
- f. Berhak untuk memungut pajak sendiri.¹⁰

Namun demikian, konstitusi mengatur dan mengakui bahwa pemerintahan desa yang didasarkan kepada adat istiadat, atau asal usulnya yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945 asli dan penjelasan pasal tersebut

⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Peita I-Pelita IV*, Disertasi Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 104.

¹⁰ *Op.Cit.*, hlm. 40

adalah selain syarat-syarat teoretis tersebut juga memberikan kesempatan kepada desa (adat) untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri berdasarkan asal usulnya yang bersifat spesifik di setiap desa.

Setelah perubahan UUD Tahun 1945, substansi Pasal 18 yang semula sekedar menyebutkan desa dalam penjelasannya, kemudian ditempatkan sebagai ketentuan normatif dalam batang tubuh sehingga menjadi Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, substansi pengaturan pasal tersebut adalah berarti :

- a. Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- b. Satu-kesatuan tersebut harus bersifat khusus atau tertentu pula;
- c. Masyarakat hukum adat masih hidup;
- d. Berada dalam lingkungan tertentu;
- e. Pengakuan dan penghormatan diberikan berdasarkan ukuran kelayakan manusia sesuai dengan perkembangan peradaban bangsa;
- f. Pengakuan dan penghormatan tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai satu negara kesatuan.¹¹

2.2. Landasan Yuridis

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional bagi bagi Pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain dari itu, Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 memberikan penegasan akan eksistensi kampung sebagai kesatuan masyarakat terendah dalam hirarki pemerintahan di daerah, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Study HTN, FH UI, Jakarta, 2002, hlm. 24.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Pasal 14 UU Pemda memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengurus kewenangan yang bersifat wajib dalam skala kabupaten/kota yang meliputi : a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping urusan wajib tersebut, pemerintah daerah Kabupaten/kota mempunyai urusan pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 21 menjelaskan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih pimpinan daerah; c. mengelola aparatur daerah; d. mengelola kekayaan daerah; e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban kabupaten/kota sebagai daerah otonom berdasarkan Pasal 22 UU Pemda adalah meliputi : a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. mengembangkan sistem jaminan sosial; i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; k. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; l. melestarikan lingkungan hidup; m. mengelola administrasi kependudukan; n. melestarikan nilai sosial budaya; o. membentuk dan menerapkan peraturan

perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan p. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, UU Pemda 2004 mengatur dan mengakui keberadaan desa dalam Bab XI tentang Desa, mulai Pasal 200 sampai Pasal 216. Pengaturan tersebut meliputi enam hal, yaitu bagian umum yang menegaskan keberadaan desa dalam dan menjadi pemerintahan daerah yang dibuat dengan peraturan daerah, kedua, mengatur pemerintah kampung yang terdiri dari kepala kampung dan perangkat kampung, ketiga mengatur Badan Perwakilan Kampung yang bertindak serupa dengan legislatif di tingkat kampung, keempat, mengatur pembentukan lembaga lain dalam kampung yang mempunyai tugas untuk bekerjasama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, kelima mengatur keuangan kampung, termasuk sumber-sumber dan keenam mengatur kerjasama kampung.

Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan yang terdapat dalam Pasal 216 yang mengatur keberadaan kampung untuk diatur dalam perda dengan memperhatikan asal-usul atau adat istiadat daerah.

Pasal 216

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati

hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Pasal 14 UU P3 menegaskan bahwa materi muatan Perda adalah berisi substansi yang mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Disamping itu, lampiran II UU P3 angka 39 dan 40 memberikan penegasan dasar peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan peraturan daerah, yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota

Salah satu urusan wajib yang terdapat dalam Pasal 7 adalah pembinaan masyarakat dan desa, artinya pembentukan kampung yang menjadi cikal bakal konstitusional penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adalah salah satu urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan wajib dimaksud meliputi a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; x. kebudayaan; y. statistik; z. kearsipan; dan aa. perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. Ketransmigrasian, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

PP ini merupakan implementasi dari Pasal 216 UU Pemda 2004 yang mengalami perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No 8 Tahun 2005. Dalam PP disebutkan secara jelas pengertian desa yang didalamnya mencakup istilah kampung atau padanan lainnya digunakan untuk menyebutkan sistem pemerintahan setingkat desa.

Pasal 2 ayat (2) mengatur syarat pembentukan kampung yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, perangkat serta sarana dan prasarana pemerintahan yang diharapkan dapat menunjang jalannya roda pemerintahan kampung.

Secara normatif, pembentukan kampung berdasarkan PP ini adalah merujuk kepada Pasal 4 yang menegaskan keberadaan peraturan daerah yang menjadi ujung tombak pembentukan suatu kampung, tetapi pengimplementasiannya dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri, serta dilaksanakan dengan memperhatikan hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat yang akan dibentuk.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan daerah, sehingga dalam pelaksanaan pengawasannya, pemerintah daerah melalui inspektorat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dan apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat temuan, maka pemerintahan mempunyai kewajiban yang sama dengan pemerintahan daerah untuk melakukan apa yang menjadi perintah dari inspektorat tersebut.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Permendagri merupakan implemementasi dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Permendagri mengatur syarat-syarat

pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Berdasarkan Pasal 2, pembentukan desa atau kampung adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari jumlah penduduknya, Kampung Indra Loka II dapat dimekarkan menjadi maksimal 8 kampung baru, tetapi dalam raperda hanya membentuk 2 kampung baru dari induknya, sehingga berjumlah menjadi tiga kampung baru. Selain keharusan syarat minimal jumlah penduduk, permendagri mengatur pula syarat pembentukan kampung harus terpenuhi adanya a. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; b. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; d. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; e. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan f. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pasal 5 mengatur bahwa dalam pembentukan kampung baru, pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat desa yang akan mengalami pemekaran, yang pada akhirnya dientuk raperda

untuk diusulkan kepada DPRD guna mendapat pembahasan bersama serta selanjutnya memperoleh persetujuan secara depinitif sebagai perda yang membentuk kampung, yang dalam hal ini adalah Indra Loka Mukti dan Indra Loka Jaya. Dengan demikian, kehadiran kedua kampung tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi legal sehingga mempunyai status hukum yang sederajat dengan kampung-kampung lainnya dalam perlakuan, pembinaan dan pemngawasan oleh pemerintah daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung dan Perubahan Status Kmapung Menjadi Kelurahan (lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8, Tabahan Lembaran Daerah Nomor 9)

Perda ini merupakan perwujudan Pasal 4 PP 72 Tahun 2005 tentang desa dan Permendagri 28 Tahun 2006. Pembentukan dasar hukum pembentukan kampung dalam bentuk perda merupakan kewajiban pemerintah daerah yang sebelumnya dilakukan penjarangan terhadap masyarakat akan [pelu tidaknya dilakukan pembentukan kampung yang baru. Jika, proses tersebut telah dilaksanakan, Pasal 4 Perda mengatur adanya kewajiban kepala daerah Tulang Bawang untuk mengajukan Raperda pembentukan kampung tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya

mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama.

Berdasarkan sinkronisasi dan harmoniasi peraturan perundang-undangan tersebut, maka landasan atau pertimbangan hokum dalam pembentukan peraturan perundangan merupakan cara agar tidak terjadi tumpang tindih baik secara vertical ataupun horizontal. Sesuai dengan pedoman yangterdapat dalam lampiran II angka 39 dan 40 UU P3, maka landasan yuridis yang dipergunakan dalam Raperda tentang pembentukan kampung adalah meliputi antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

III. Penutup

3.1. Simpulan

- a. Landasan teoretis dalam pembentukan kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah mencakup asal usul kampung, kedudukan dan wewenang pemerintahan daerah dalam mengatur kampung dengan peraturan daerah.
- b. Landasan Yuridis pembentukan kampung adalah sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

3.2. Saran

Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap kelayakan dalam pembentukan kampung-kampung yang baru di wilayah tulang bawang barat dengan mencakup pemenuhan standar minimal yang terdapat dalam Pasal 3 huruf c sampai huruf g Permendagri Nomor 28 Tahun 2006.

Daftar Pustaka

- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara, Malang, 2012.
- Ateng Syafrudin, dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2010.
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Peita I-Pelita IV*, Disertasi Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Study HTN, FH UI, Jakarta, 2002

- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2002
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991,
- Rulis Effendi, dkk, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 1991,
- Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary : Definition of the term and pharses of American and English Jurisfrudence, American and Modern*, (ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979)
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (terjemahan : A. Sidharta), Citra Aditya Bhakti, bandung, 1996,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982,
- Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1985,
- ML. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Jimly Asshiddiqie 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, 2006. *Perihal Undang-undang*, KoNpres, Jakarta.
- A. Mukthie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Tom Gunadi, 1990. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD'45*, Bandung: Angkasa.
- Mohammad Hatta, 1954. *Beberapa Fasal Ekonomi : Djalan Keekonomian dan Kooperasi*, Cetakan Ke-5, Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Johnny Ibrahim 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*
- Masrukan, 1981, *Pancasila dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dasar Negara dan pandangan Hidup bangsa Indonesia*, Surabaya: Usaha Offset Printing.
- CF Strong, 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia. Bayu Media: Malang.
- Sri Soemantri 1997. *Hak Menguji Materil di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- ARmen Yasir 2009. *Hukum Perundang-undangan*, Lemlit Unila.
- Yuliandri, 2010. *Asas-asas Pembentukan Praturan Perundang-undangan yang Baik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di

- Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);